

KEMENKO KUMHAM IMIPAS

Indonesia dan Belanda Sepakati Mekanisme Pemindahan Narapidana

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menandatangani Practical Arrangement dengan Pemerintah Kerajaan Belanda pada Selasa lalu (2/12). Penandatanganan dilakukan oleh Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mewakili Pemerintah Indonesia, dan Menteri Luar Negeri Belanda, D. M. van Weel.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah dalam memperkuat kerja sama bilateral, khususnya terkait mekanisme pemindahan narapidana warga negara Belanda yang sedang menjalani hukuman di Indonesia. Proses penyusunannya telah melalui pembahasan intensif sejak awal 2025. "Kesepakatan ini memastikan proses pemindahan dilakukan secara tertib, sesuai hukum, dan tetap mengedepankan aspek kema-



HUMAS KEMENKO KUMHAM IMIPAS

nusiaan," ujar Yusril.

Practical Arrangement tersebut memuat ketentuan teknis dan administratif pemindahan narapidana, mulai

dari tata cara pelaksanaan, pengaturan logistik, penanganan kesehatan, hingga pembiayaan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab

JALIN KESEPAKATAN:

Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan D.M. van Weel (kanan) memastikan seluruh prosedur pemindahan napi berjalan sesuai hukum nasional dan prinsip kerja sama internasional.

Pemerintah Belanda. Rangkaian pembahasannya dilakukan sejak 28 Februari hingga 1 Desember 2025.

Melalui pengaturan ini, dua narapidana, Siegfried Mets, 74, terpidana mati dengan riwayat cedera fraktur lengan; serta Ali Tok-

man, 65, terpidana seumur hidup kasus narkoba dengan riwayat hipertensi, akan menjadi kelompok pertama yang dipindahkan. Keduanya dijadwalkan terbang ke Amsterdam pada Senin, 8 Desember 2025 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Yusril menegaskan bahwa kerja sama tersebut mencerminkan komitmen kedua negara untuk menjalankan proses pemindahan secara profesional dan tran-

sparan. "Indonesia selalu terbuka untuk kerja sama yang mengedepankan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu yang menjalani pidana," ujarnya.

Penandatanganan ini sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai hukum nasional dan prinsip kerja sama internasional, termasuk perlindungan kesehatan narapidana. (bry/ali)